

**STRATEGI *TRACK II DIPLOMACY* DES ALWI DALAM UPAYA
MEREDAKAN KONFLIK INDONESIA–MALAYSIA 1963–1966****SUPRIYADI LA AWE**

Pendidikan Sejarah, Universitas Banda Naira

Email: supriyadilaawe1@gmail.com**ABSTRACT**

The 1963–1966 Indonesia–Malaysia confrontation created the need for more flexible communication channels amidst official political tensions. This article aims to analyze Des Alwi's Track II Diplomacy strategy in an effort to defuse the 1963–1966 Indonesia–Malaysia conflict. The research employs historical methods with a qualitative approach through the collection and analysis of diplomatic documents, archives, and historical sources, examined through heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results show that Des Alwi conducted informal diplomacy through personal and flexible channels, particularly by leveraging his close relationship with Tun Abdul Razak to foster more open communication between the two countries. This strategy was realized through secret meetings, informal negotiations without the involvement of third parties, and the building of bilateral understanding and trust. This approach accelerated the creation of a conducive dialogue space and contributed to resolving the 1966 Indonesia–Malaysia Confrontation. Thus, Des Alwi's role demonstrates that Track II diplomacy can be an important instrument in resolving bilateral conflicts in Southeast Asia.

Keywords: *Informal Diplomacy, Indonesia–Malaysia, Confrontation, Des Alwi*

ABSTRAK

Konfrontasi Indonesia–Malaysia 1963–1966 melahirkan kebutuhan akan jalur komunikasi yang lebih luwes di tengah ketegangan politik resmi. Artikel ini bertujuan menganalisis strategi *Track II Diplomacy* Des Alwi dalam upaya meredakan konflik Indonesia–Malaysia pada 1963–1966. Penelitian menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan dan analisis dokumen diplomatik, arsip, serta sumber sejarah yang dikaji melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Des Alwi menjalankan diplomasi informal melalui jalur personal dan fleksibel, terutama dengan memanfaatkan hubungan dekatnya dengan Tun Abdul Razak untuk membuka komunikasi yang lebih terbuka antara kedua negara. Strategi ini diwujudkan melalui pertemuan rahasia, negosiasi informal tanpa keterlibatan pihak ketiga, serta pembangunan pemahaman dan kepercayaan bilateral. Pendekatan tersebut terbukti mempercepat terciptanya ruang dialog yang kondusif dan berkontribusi pada penyelesaian Konfrontasi Indonesia–Malaysia pada 1966. Dengan demikian, peran Des Alwi menunjukkan bahwa *Track II Diplomacy* dapat menjadi instrumen penting dalam penyelesaian konflik bilateral di Asia Tenggara.

Kata Kunci: *Diplomasi Informal, Indonesia–Malaysia, Konfrontasi, Des Alwi*

PENDAHULUAN

Konflik Indonesia–Malaysia yang dikenal sebagai Konfrontasi merupakan fase krusial dalam hubungan bilateral kedua negara pada periode 1963 hingga 1966 (Farrell, 2011). Konflik ini berakar pada penolakan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia, yang oleh pemerintah Indonesia dipandang sebagai proyek neokolonialisme Inggris, sekaligus berkaitan dengan ambisi politik Presiden Soekarno dalam mendorong gagasan “Indonesia Raya” (Noor, 2023, p. 6). Dalam perspektif ini, Konfrontasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai respons terhadap pembentukan negara baru, melainkan juga sebagai manifestasi dari persaingan ideologis, kepentingan geopolitik, dan resistensi terhadap pengaruh Barat di Asia Tenggara. Di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia memandang Malaysia sebagai negara boneka bentukan Barat yang merepresentasikan bentuk baru kolonialisme atau neokolonialisme (Nur & Ravico, 2021, p. 28). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia pada masa itu sangat dipengaruhi oleh orientasi anti imperialisme yang kuat. Selain itu, kekhawatiran terhadap potensi dominasi Federasi Malaysia atas wilayah Kalimantan Utara, khususnya Sabah dan Sarawak, semakin memperkuat penolakan Indonesia (Nur & Ravico, 2021, p. 26). Oleh sebab itu, penentangan Soekarno terhadap pembentukan Federasi Malaysia tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ideologis, tetapi juga pada kalkulasi strategis terkait keamanan regional dan keseimbangan kekuatan di kawasan (Chua, 2001; Noor, 2023, p. 6).

Diplomasi merupakan instrumen penting dalam hubungan internasional yang berfungsi sebagai sarana negosiasi dan komunikasi antara pihak untuk mencapai kepentingan nasional, termasuk dalam upaya meredakan konflik (Susetyo & Ravico, 2020, p. 112). Dalam perkembangan studi diplomasi kontemporer, penyelesaian konflik tidak lagi dipahami sebagai domain eksklusif aktor negara, karena keterlibatan unsur non-pemerintah juga semakin diakui memiliki kontribusi strategis. Dalam konteks ini, diplomasi jalur kedua merujuk pada partisipasi aktor non-negara sebagai pelengkap diplomasi resmi untuk memfasilitasi dialog dan menjembatani isu-isu sensitif antarnegara (Khoirunnisa & Basri, 2020, p. 5). Pendekatan ini menitikberatkan pada interaksi yang bersifat informal dan non-resmi antara kelompok-kelompok dari pihak yang berkonflik, dengan tujuan membangun saling pengertian, merumuskan strategi, mempengaruhi opini

publik, serta mengorganisasi sumber daya yang dapat mendukung penyelesaian konflik (Dipua et al., 2020, p. 105). Jika diplomasi tradisional umumnya dijalankan oleh perwakilan resmi negara melalui proses negosiasi formal pada berbagai isu strategis (Maksum et al., 2021, p. 81), maka diplomasi jalur kedua menawarkan ruang interaksi yang lebih fleksibel, inklusif, dan adaptif melalui keterlibatan beragam aktor di luar pemerintah (Putri & Indrawati, 2020, p. 6). Dengan demikian, diplomasi jalur kedua tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap diplomasi formal, tetapi juga sebagai mekanisme alternatif yang mampu membuka kanal komunikasi ketika jalur resmi menghadapi keterbatasan politik maupun kebuntuan negosiasi. Dalam konteks hubungan Indonesia–Malaysia pada masa Konfrontasi, pendekatan ini menjadi relevan karena ketegangan politik dan pertentangan ideologis pada level negara cenderung mempersempit ruang dialog formal, sehingga kehadiran aktor non-pemerintah berpotensi memainkan peran penting dalam menjaga komunikasi, membangun kepercayaan, dan menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi deeskalasi konflik.

Konflik Indonesia–Malaysia selama periode Konfrontasi umumnya dipahami melalui kerangka diplomasi negara dan kebijakan resmi pemerintah. Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana proses deeskalasi juga berlangsung melalui jalur-jalur informal yang melibatkan aktor non-pemerintah. Berangkat dari celah tersebut, artikel ini menganalisis strategi *track II diplomacy* Des Alwi dalam upaya meredakan konflik Indonesia–Malaysia 1963–1966. Kajian ini penting karena Des Alwi menempati posisi yang unik sebagai aktor non-negara yang memiliki akses personal, kemampuan komunikasi lintas pihak, dan peran mediator di tengah keterbatasan diplomasi formal. Melalui fokus tersebut, artikel ini berargumen bahwa upaya meredakan Konfrontasi tidak semata-mata ditentukan oleh negosiasi antara pemerintah, tetapi juga oleh strategi informal yang bekerja melalui jejaring personal, pembangunan kepercayaan, dan komunikasi politik non-resmi. Dengan demikian, artikel ini menawarkan pemahaman baru bahwa *track II diplomacy* bukan sekadar pelengkap diplomasi formal, melainkan bagian penting dari proses penyelesaian konflik Indonesia–Malaysia pada 1963–1966.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis strategi *Track II Diplomacy* Des Alwi dalam upaya meredakan konflik Indonesia–Malaysia tahun 1963–1966. Pendekatan ini dipilih karena kajian berfokus pada rekonstruksi peristiwa masa lalu melalui penelusuran sumber-sumber sejarah yang relevan, baik berupa dokumen diplomatik, arsip, buku, skripsi, tesis, jurnal, maupun bahan pustaka lain yang berkaitan dengan Konfrontasi Indonesia–Malaysia dan peran Des Alwi dalam proses penyelesaiannya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi dengan menyeleksi sumber primer dan sekunder yang memiliki relevansi langsung dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan melalui empat tahapan metode sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan konflik Indonesia–Malaysia serta kiprah diplomatik Des Alwi. Selanjutnya, kritik sumber dilakukan secara eksternal dan internal untuk menguji keaslian, kredibilitas, dan relevansi data yang digunakan. Setelah itu, peneliti melakukan interpretasi dengan menempatkan fakta-fakta sejarah dalam konteks hubungan Indonesia–Malaysia pada 1963–1966, khususnya untuk membaca strategi diplomasi informal yang dijalankan Des Alwi. Tahap akhir adalah historiografi, yakni penyusunan hasil penelitian secara sistematis dan analitis dalam bentuk narasi ilmiah yang menekankan hubungan antara temuan historis dan konsep *Track II Diplomacy*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Des Alwi dan Perannya sebagai Aktor Track II Diplomasi

Des Alwi lahir pada 17 November 1927 di Banda Neira, wilayah penting dalam sejarah perdagangan rempah. Ia berasal dari keluarga terpandang. Dari garis ibu, ia terhubung dengan tokoh masyarakat Banda, sedangkan dari garis ayah dengan bangsawan Palembang. Kakeknya, Said Tjong Baadilla, dikenal sebagai “Raja Mutiara” dan merupakan salah satu pengusaha terbesar di Hindia Belanda melalui dominasi bisnis mutiara di Maluku (Alwi, 2010). Latar belakang campuran Des Alwi serta kedekatan keluarganya dengan komunitas Arab dan Tionghoa memberinya perspektif luas tentang

identitas, kepemilikan, dan relasi antarkelompok di Banda yang multietnis. Pengalaman ini membentuk pemahamannya terhadap ketimpangan dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat kolonial, sekaligus menjadi bekal untuk menghadapi perubahan sosial yang terjadi (Fraassen, 2009). Kesempatan pendidikan Des Alwi banyak dipengaruhi oleh kedekatan keluarganya dengan tokoh nasionalis seperti Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir. Sejak kecil, interaksi langsung dengan keduanya turut membentuk karakter dan pandangan politik Des Alwi.

Des Alwi merupakan tokoh sipil yang memiliki peran krusial dalam diplomasi jalur kedua untuk meredakan ketegangan antara Indonesia dan Malaysia selama periode Konfrontasi (Superman, 2017, p. 5). Pendekatan ini didefinisikan sebagai interaksi informal antarkelompok atau negara yang berseteru dengan tujuan mengembangkan strategi, mempengaruhi opini publik, dan mengelola sumber daya untuk resolusi konflik (Dipua et al., 2020, p. 105). Meskipun konflik Indonesia-Malaysia selama 1963-1966 merupakan "perang intensitas rendah yang tidak diumumkan", namun tensi diplomatik dan militer yang tinggi mengancam eskalasi menjadi konflik berskala besar (Farrell, 2011). Dalam konteks ini, diplomasi jalur kedua yang dijalankan oleh individu non-pemerintah seperti Des Alwi menjadi sangat signifikan untuk memfasilitasi komunikasi dan membangun jembatan antara pihak yang berkonflik, di luar saluran diplomatik resmi yang kerap terhambat oleh kepentingan politik dan protokol formal (Khoirunnisa & Basri, 2020, p. 11). Pada masa tersebut, Malaysia menuduh Indonesia sebagai negara neokolonial yang berupaya memperluas pengaruh imperialnya, sementara Indonesia menganggap pembentukan Federasi Malaysia sebagai bentuk perpanjangan kekuasaan kolonial Inggris (Lindsay & Liem, 2011, p. 176). Sikap penentangan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia ini semakin mengeras pada Januari 1963, ketika Menteri Luar Negeri Subandrio secara resmi menyatakan kebijakan konfrontasi (Nur & Ravico, 2021, p. 27).

2. Konflik Indonesia–Malaysia sebagai Konteks Munculnya Diplomasi Informal

Konflik ini dipicu oleh keyakinan Presiden Sukarno bahwa pembentukan Malaysia adalah manifestasi neokolonialisme Inggris yang mengancam ambisinya untuk menciptakan "Indonesia Raya" (Noor, 2023, p. 6). Selain itu, Sukarno juga merasa bahwa

pembentukan Federasi Malaysia tanpa konsultasi dengan Indonesia merupakan bentuk penghinaan terhadap kedaulatan dan kepentingan regionalnya (Nur & Ravico, 2021, p. 28). Sukarno mengklaim bahwa Federasi Malaysia merupakan ancaman keamanan dan upaya untuk mengepung Indonesia, meskipun argumen ini terbukti dilebih-lebihkan dan tidak cukup menjadi motif utama konflik (Chua, 2001; Noor, 2023, p. 6).

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1966, pemerintah menegaskan bahwa penguatan agenda Ganyang Malaysia dipandang sebagai bagian penting dari pelaksanaan politik konfrontasi negara. Dokumen itu menyebutkan bahwa pengangkatan pejabat baru diperlukan “untuk lebih meningkatkan dan mensukseskan pelaksanaan Dwikora, khususnya pengganjangan proyek NEKOLIM ‘Malaysia’ sesuai dengan situasi dan tingkat Revolusi dewasa ini.” Kutipan ini menunjukkan bahwa kebijakan Ganyang Malaysia ditempatkan dalam kerangka Dwikora dan dipahami sebagai proyek politik yang harus dijalankan secara lebih intensif pada masa itu.

Pernyataan Dwikora yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno semakin mempertegas sikap konfrontatif Indonesia dengan seruan untuk menghancurkan Malaysia dan mendukung perjuangan revolusioner rakyat di wilayah tersebut (Priyowidodo & Indrayani, 2012, p. 430). Retorika anti-Malaysia Sukarno, yang disebarkan melalui lagu-lagu populer dan media massa, bertujuan memobilisasi dukungan domestik dan internasional untuk menghadapi Federasi Malaysia (Farram, 2014; Ghani & Paidi, 2020). Pemerintah Indonesia menyadari bahwa Federasi Malaysia berpotensi menguasai wilayah Kalimantan Utara, yakni Sabah dan Sarawak, sehingga penolakan terhadap pembentukan federasi tersebut menjadi awal konfrontasi (Nur & Ravico, 2021, p. 26). Sebagai reaksi terhadap pembentukan Federasi Malaysia dan tuduhan intervensi, Presiden Soekarno kemudian mengumumkan Komando Dwikora pada 3 Mei 1963, yang kemudian diikuti dengan seruan "Ganyang Malaysia" pada 23 Juli 1963, menandai dimulainya Konfrontasi secara resmi (Marihandono, 2016, p. 144).

Arsip Pengurus Besar Front Nasional tertanggal 31 Juli 1963 menunjukkan bahwa kampanye Ganyang Malaysia tidak dapat dipahami semata sebagai ledakan retorika politik, tetapi sebagai bagian dari mekanisme mobilisasi negara yang terstruktur. Surat tersebut secara jelas meminta organisasi massa dan partai untuk melaporkan hubungan

mereka dengan “organisasi-organisasi internasional” serta menjelaskan “bantuan apa yang dapat diharapkan” guna melawan “neo-kolonialisme, khususnya neo-kolonialisme Malaysia.”

Sikap konfrontatif ini semakin diperkuat dengan tuduhan Indonesia bahwa Malaysia adalah negara boneka Inggris yang mengancam kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, sehingga memunculkan sentimen nasionalisme anti-neo-kolonialisme di kalangan masyarakat (Lindsay & Liem, 2011, p. 342). Indonesia bahkan mendukung Pasukan Gerilya Rakyat Serawak dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara yang didominasi etnis Tionghoa pro-komunis dalam upaya menentang Federasi Malaysia (Purmintasari, 2015, p. 2). Konflik ini juga ditandai dengan upaya Inggris untuk mengkonsolidasikan koloninya di Asia Tenggara melalui Federasi Malaysia, yang ditentang keras oleh Indonesia yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap kemerdekaannya (Purmintasari, 2015, p. 11).

Reaksi Indonesia ini juga didorong oleh kekhawatiran akan stabilitas regional pasca-kemerdekaan serta interpretasi strategis terhadap gejolak geopolitik Asia Tenggara yang sedang berlangsung (Jones, 2001). Terlebih lagi, pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963 dianggap oleh Presiden Soekarno sebagai ancaman eksistensial terhadap Indonesia, terutama dengan masuknya koloni Inggris di Kalimantan Utara ke dalam federasi tersebut (Marihandono, 2016, p. 143). Latar belakang konflik ini semakin diperumit oleh klaim Filipina atas sebagian wilayah Sabah sejak tahun 1968, yang menunjukkan kompleksitas geopolitik regional di sekitar pembentukan Malaysia (Dollah et al., 2025).

Kompleksitas konflik tersebut menunjukkan bahwa ketegangan Indonesia–Malaysia tidak semata-mata berakar pada persoalan teritorial atau kepentingan politik negara, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi ancaman, kecurigaan antar pemimpin, dan rapuhnya saluran komunikasi bilateral. Dalam situasi seperti ini, penyelesaian konflik tidak cukup hanya mengandalkan diplomasi formal negara, melainkan juga memerlukan peran aktor non-negara yang mampu menjembatani hubungan secara lebih personal dan fleksibel. Di titik inilah Des Alwi memperoleh relevansinya. Dengan latar pergaulan yang luas, kedekatan dengan elite politik, serta kemampuannya membangun komunikasi

informal, Des Alwi tampil sebagai figur yang dapat membuka kembali ruang dialog di tengah memburuknya hubungan kedua negara.

Dalam menjalankan perannya, Des Alwi juga sangat peka terhadap aspek psikologis dan emosional para pemimpin Malaysia. Ia memahami bahwa konfrontasi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengancam stabilitas kawasan. Karena itu, ia berupaya membangun kembali rasa percaya melalui jaringan pertemanan lama yang telah terbentuk sejak akhir 1940-an. Hubungan personal Des dengan Razak, termasuk pengenalan Razak kepada Soeharto pada masa sebelumnya, menjadi unsur penting dalam menciptakan saluran komunikasi yang lebih cair dan meyakinkan. Kemampuan membaca situasi dan memilih momentum inilah yang memperkuat peran Des dalam proses perintisan perdamaian (Mahpudi, 2011).

3. Strategi *Track II Diplomacy* Des Alwi dalam Peredaan Konflik Indonesia–Malaysia

Dalam perspektif konflik Karl Marx, Konfrontasi Indonesia–Malaysia 1963–1966 tidak hanya merupakan sengketa diplomatik, tetapi juga benturan kepentingan struktural pada akhir dekolonisasi Asia Tenggara. Sukarno memandang Federasi Malaysia sebagai proyek neo-kolonial Inggris, sementara secara Marxian konflik ini mencerminkan perebutan kontrol atas tatanan regional, sumber daya, dan arah perkembangan pascakolonial. Perbedaan jalur Indonesia dan Malaysia terhadap modal asing dan warisan kolonial, serta kuatnya unsur anti komunisme, menempatkan Konfrontasi sebagai pertarungan antara proyek anticolonial, kepentingan negara, dan struktur kekuasaan internasional (White, 2017).

Dalam kerangka tersebut, konflik tidak hanya berlangsung pada tingkat kebijakan resmi dan konfrontasi militer, tetapi juga pada ranah relasi antar elite yang menentukan kemungkinan deeskalasi. Ketika jalur diplomasi formal mengalami kebuntuan akibat pertarungan ideologis, kecurigaan politik, dan tekanan struktural internasional, kebutuhan akan saluran komunikasi alternatif menjadi semakin mendesak. Pada titik ini, aktor non-negara dengan akses personal, legitimasi sosial, dan kemampuan membangun kepercayaan antara pihak memperoleh peran penting. Kehadiran figur seperti Des Alwi menunjukkan bahwa di tengah konflik yang dibentuk oleh struktur kekuasaan yang lebih

luas, inisiatif informal tetap dapat membuka ruang negosiasi dan menjadi jembatan awal bagi penyelesaian politik.

Dalam konteks eskalasi tersebut, Des Alwi memanfaatkan jaringan personal dan informalnya untuk membangun komunikasi rahasia antara Jakarta dan Kuala Lumpur, menjembatani perbedaan pandangan, dan mencari solusi diplomatik di luar jalur resmi yang terhambat oleh retorika keras kedua belah pihak. Pendekatan ini berupaya menciptakan ruang dialog yang netral untuk meredakan ketegangan, terutama mengingat klaim Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia sebagai bentuk neokolonialisme Inggris yang mengancam stabilitas regional (Karuppannan & Yacob, 2020). Kemampuan Des Alwi dalam meredakan ketegangan juga tampak dalam pertemuan bilateral lanjutan yang berlangsung di Kedah. Atas permintaan Tun Abdul Razak, Des menyarankan agar rombongan Indonesia bertemu langsung dengan Tunku Abdul Rahman. Ketika delegasi tiba di Kedah, suasana berlangsung jauh lebih hangat dibandingkan di Kuala Lumpur. Mereka disambut antusias oleh ratusan warga yang dikerahkan UMNO, sementara Tunku Abdul Rahman menerima Des dengan keramahan khas Melayu. Dalam pertemuan itu, Tunku kemudian meminta Razak untuk segera melanjutkan perundingan dengan pihak Indonesia demi mempercepat berakhirnya konflik. Peristiwa ini menegaskan bahwa Des Alwi memainkan peran penting sebagai jembatan diplomatik yang membantu mencairkan ketegangan, membangun kepercayaan, dan membuka jalan menuju penyelesaian konfrontasi Indonesia-Malaysia (Pour, 1993).

Des Alwi yang merupakan kerabat dekat dengan perdana menteri Malaysia, Tunku Abdul Rahman, memiliki akses unik yang memungkinkannya berperan sebagai perantara utama dalam upaya mediasi ini. Akses ini sangat penting mengingat penolakan Indonesia terhadap pembentukan Malaysia pada tahun 1963, yang dianggap sebagai kelanjutan dari imperium kolonial Britania Raya (Jones, 2001).

Signifikansi peran Des Alwi dalam hubungan Indonesia–Malaysia juga tercermin dari pengakuan elite politik Malaysia. Kesaksian ini penting karena memperlihatkan bahwa Des Alwi tidak hanya hadir sebagai figur perantara, tetapi juga dipandang memiliki kontribusi konkret dalam proses pengakhiran Konfrontasi. Datuk Harris Mohd. Salleh menyatakan:

“Mengenal Pak Des ketika Tun Mustapha Dato Harun dan saya diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia. Ternyata, beliau adalah teman sekolah Tun Abdul Razak dan para pemimpin Asia lainnya saat mereka belajar di Eropa. Dialah yang bertanggung jawab besar untuk mengakhiri konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Malaysia menganugerahinya gelar Tan Sri, penghargaan kehormatan tertinggi kedua di negara tersebut.”

Selanjutnya, pernyataan Jusuf Wanandi mengkonfirmasi peran Des Alwi sebagai figur penghubung yang memiliki akses personal dan legitimasi politik lintas batas. Jusuf Wanandi menyatakan:

“Dia membantu Pak Ali dalam upayanya mengakhiri konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Segera setelah Pak Yani dan Pak Harto meminta Pak Ali untuk mengakhiri konfrontasi, Pak Ali langsung menghubungi teman-teman ex-PRRI/Permesta M. Simbolon, Achmad Husein, Ventje Sumual, Daan Jahja, Jan Walandouw, dan Willy Pesik untuk meminta saran dan bantuan. Mereka menyarankan agar dia menghubungi Des, yang saat itu tinggal di Kuala Lumpur dan sangat akrab dengan Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia saat itu yang juga Menteri Luar Negeri. Mereka sudah bersahabat sejak masa studi mereka di London. Pak A.R. Ramly, salah satu asisten terpercaya Pak Ali, dikirim ke Hong Kong untuk menemui Des.”

Kedekatan yang terjalin sejak masa muda tersebut kemudian menjadi modal penting dalam diplomasi informal yang dijalankan Des Alwi pada masa konfrontasi. Ketika Ali Moertopo memintanya menghubungi Tun Abdul Razak pada pertengahan 1965, Des segera memanfaatkan hubungan lamanya itu. Razak menanggapi sinyal perdamaian dari Indonesia secara positif, meskipun Tunku Abdul Rahman saat itu belum sepenuhnya melihat adanya itikad damai dari pihak Indonesia. Dalam situasi ini, Des Alwi berperan penting meyakinkan Razak bahwa tawaran damai tersebut bukan hasil komunikasi lama, melainkan datang langsung dari Kostrad di bawah Soeharto. Hal ini menunjukkan kapasitas Des sebagai mediator yang mampu menggabungkan pendekatan formal dengan kedekatan personal yang tulus (Suyono, 2015).

Bekal dari apa yang diwariskan oleh Mohammad Hatta, seorang diplomat ulung, Des Alwi mampu menavigasi kompleksitas politik dan diplomatik, memanfaatkan

hubungan personal tersebut untuk memecah kebuntuan komunikasi formal yang ada. Hal ini sejalan dengan karakteristik diplomasi jalur kedua yang mengandalkan individu atau kelompok non-pemerintah untuk memfasilitasi komunikasi dan negosiasi informal guna meredakan konflik (Pye & Jones, 2002). Des Alwi dengan kapasitasnya sebagai diplomat non-resmi dan kedekatan historisnya dengan petinggi kedua negara, berupaya mengurangi ketegangan regional yang timbul akibat protes Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Federasi Malaysia (Tilman, 1963). Secara spesifik, keterlibatannya dalam diplomasi informal ini bertujuan untuk menemukan titik temu di tengah konfrontasi yang mengancam stabilitas geopolitik Asia Tenggara, yang juga merupakan bagian dari upaya Indonesia dalam diplomasi pertahanan untuk menjaga integritas teritorial dan keamanan regional (Laksmana et al., 2011, p. 15). Peran Des Alwi sebagai mediator non-pemerintah ini krusial dalam menyediakan kanal komunikasi alternatif ketika saluran diplomatik formal mengalami kebuntuan, terutama saat tegangan mencapai puncaknya di antara kedua negara.

Indonesia menyatakan kesiapan berunding tanpa syarat pada 11 Februari 1965, tetapi tawaran itu ditolak Malaysia sehingga hubungan diplomatik kedua negara semakin memburuk. Ketegangan kian meningkat setelah Malaysia pada 5 Maret 1966 meminta Dewan Keamanan PBB menetapkan Indonesia sebagai agresor menyusul serangan udara Indonesia pada 1 dan 2 September 1964. Meski berbagai upaya mediasi dari Jepang, Filipina, dan negara lain terus dilakukan, penyelesaian damai belum tercapai dan konfrontasi semakin memanas sepanjang 1964 hingga awal 1965 (Bondan, 1966). Penyelesaian konflik yang cepat didukung oleh perubahan besar dalam politik domestik kedua negara. Di Indonesia, peristiwa Gerakan 30 September 1965 melemahkan posisi Sukarno dan membuka jalan bagi Soeharto mengambil alih kekuasaan melalui Supersemar. Pergantian ini turut menggeser kebijakan luar negeri Indonesia dari sikap konfrontatif dan revolusioner ke arah yang lebih pragmatis, stabil, dan berorientasi pada pembangunan nasional. Des Alwi mampu membaca perubahan politik tersebut dan memanfaatkannya untuk mendorong perundingan yang lebih konstruktif. Ia menyadari bahwa peluang damai lahir dari pertemuan kepentingan politik dan ekonomi, sehingga dalam negosiasi ia menekankan bahwa perdamaian akan memberi manfaat jangka panjang berupa kerja sama ekonomi regional, stabilitas domestik, dan peningkatan

reputasi internasional kedua negara. Bagi Des Alwi, perdamaian bukan tanda kekalahan, melainkan investasi strategis bagi masa depan kawasan (Sunarti, 2017).

Keberhasilan Des Alwi dalam mempercepat penyelesaian konflik menunjukkan bahwa sengketa internasional tidak selalu harus diselesaikan melalui diplomasi multilateral yang panjang dan rumit. Dalam konteks Indonesia dan Malaysia yang memiliki kedekatan sejarah, budaya, dan geografis, diplomasi personal berbasis kepercayaan terbukti lebih efektif. Atas kontribusinya dalam memperbaiki hubungan kedua negara, Des Alwi dianugerahi gelar Tan Sri oleh Malaysia dan Bintang Mahaputra Utama dari Indonesia pada tahun 2000 (Alwi, 2006). Perannya menegaskan pentingnya jalur informal atau *Track II Diplomacy*, yaitu diplomasi tidak resmi oleh aktor non-negara yang mampu mempengaruhi hasil negosiasi. Dengan demikian, Des Alwi tidak hanya menjadi fasilitator diplomatik, tetapi juga arsitek perdamaian yang memanfaatkan momentum dan jaringan personal untuk menyelesaikan konflik sekaligus memperkuat fondasi hubungan Indonesia-Malaysia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Des Alwi memainkan peran penting dalam upaya meredakan konflik Indonesia–Malaysia tahun 1963–1966 melalui strategi yang dalam artikel ini dapat dibaca sebagai *Track II Diplomacy*. Strategi tersebut dijalankan melalui jalur yang lebih pribadi dan fleksibel, dengan memanfaatkan hubungan personal yang telah lama terbangun, terutama dengan Tun Abdul Razak, untuk membuka komunikasi yang lebih terbuka dan efektif di tengah kebuntuan hubungan resmi kedua negara. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk diplomasi informal, pengaturan pertemuan-pertemuan rahasia, negosiasi tanpa keterlibatan pihak ketiga, serta pembangunan pemahaman dan kepercayaan bilateral yang menjadi dasar penting bagi terciptanya ruang dialog yang kondusif. Keberhasilan pendekatan tersebut terlihat dari perannya dalam mempercepat proses negosiasi menuju normalisasi hubungan Indonesia–Malaysia pada 1966, sehingga menunjukkan bahwa penyelesaian konflik bilateral tidak selalu bergantung pada diplomasi formal negara, tetapi juga dapat ditentukan oleh aktor non-formal yang memiliki akses, legitimasi personal, dan kemampuan membaca momentum politik secara tepat. Dengan demikian, peran Des Alwi menegaskan bahwa

Track II Diplomacy merupakan instrumen yang efektif dalam resolusi konflik, khususnya ketika jalur diplomasi resmi mengalami kebuntuan.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip Nasional RI

Bondan, M. (1966). Komando Ganyang Malaysia, sekitar amanat 17 Agustus 1966 dan persetujuan damai Indonesia - Malaysia. Arsip Tekstual Mohammad Bondan 1945–1968, Komando Ganyang Malaysia, Jakarta.

Pengurus Besar Front Nasional. 1963. “Mengganyang Malaysia.” Surat No. 007/[tidak terbaca]/SRT/VII/63, 31 Juli 1963, dengan lampiran “Pernyataan dan Usul-usul Rakyat Indonesia untuk Mengganyang Malaysia,” 27 Juli 1963. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Buku:

Alwi, D. (2006). Sejarah Banda Naira. Jakarta: Pustaka Bayan & YWBBN.

Alwi, D. (2010). A Boy from Banda: A Story of Spice Island Childhood. PT Dian Rakyat. Jakarta

Sinjal, D., Hoesein, R., Alwi, T., & Ely, T. (2011). Des Alwi: Dari Banda Naira menjadi Indonesia. Sinar Harapan.

Suyono, Seno Joko. Kalim, Nurdin. (2015). Benny Moerdani: Yang Belum Terungkap. Seri Buku Tempo. PT Gramedia : Jakarta

Pour, Julius. 1993. Benny Moerdani: Profil Prajurit Negarawan. Cet. 3. Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman. xxiv + 628 hlm. ISBN 979-8313-03-8.

Artikel Jurnal:

Chua, L. (2001). Konfrontasi : rethinking explanations for the Indonesia-Malaysia confrontation, 1963-1966 [Massachusetts Institute of Technology]. In DSpace@MIT (Massachusetts Institute of Technology). <http://hdl.handle.net/1721.1/8260>

Dollah, R., Omar, M. A., Ahmad, H. N. A. N., Jafar, A., & Dino, N. (2025). THE ABU SAYYAF GROUP AND KIDNAPPING FOR RANSOM IN SABAH, MALAYSIA, 2000–2023. *Journal International Studies*, 21(1), 155. <https://doi.org/10.32890/jis2025.21.1.9>

Farram, S. (2014). Ganyang! Indonesian Popular Songs from the Confrontation Era, 1963–1966. *Bijdragen Tot de Taal- Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 170(1), 1. <https://doi.org/10.1163/22134379-17001002>

- Farrell, B. P. (2011). Indonesia–Malaysia Confrontation (1962–1966). In *The Encyclopedia of War*. <https://doi.org/10.1002/9781444338232.wbeow299>
- Jones, M. F. (2001). *Conflict and Confrontation in South East Asia, 1961–1965*. In Cambridge University Press eBooks. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511497346>
- Marihandono, D. (2016). Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat: Sumber Sejarah dan Permasalahannya. *Paradigma Jurnal Kajian Budaya*, 1(2), 132. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v1i2.10>
- Noor, M. M. M. (2023). The Malaysia-Indonesia Confrontation: The Allegations Against Burhanuddin al-Helmi for Conspiring with Sukarno, 1963. *Paramita Historical Studies Journal*, 33(2). <https://doi.org/10.15294/paramita.v33i2.43501>
- Nur, C., & Ravico, R. (2021). GANYANG MALAYSIA Studi Historis Politik Luar Negeri Indonesia-Malaysia Tahun 1963-1966. *Deleted Journal*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.32502/jdh.v1i1.3594>
- Priyowidodo, G., & Indrayani, I. I. (2012). Bingkai Media terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia (Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Sengketa Perbatasan Kelautan dan Perairan Indonesia-Malaysia Pasca Insiden 13 Agustus 2010 dalam Kompas online). *Jurnal ASPIKOM*, 1(5), 429. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v1i5.46>
- Purmintasari, Y. D. (2015). PERISTIWA PEMBERANTASAN PGRS-PARAKU DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 1967 (KAJIAN TEORI HEGEMONI GRAMSCI UNTUK PEMBELAJARAN SEJARAH LOKAL). *ISTORIA Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 10(1). <https://doi.org/10.21831/istoria.v10i1.3601>
- Pye, L. W., & Jones, M. (2002). Conflict and Confrontation in South East Asia, 1961-1965: Britain, the United States, Indonesia and the Creation of Malaysia. *Foreign Affairs*, 81(3), 178. <https://doi.org/10.2307/20033220>
- Dipua, A., Harahab, N., Hermawan, R., & Puspitawati, D. (2020). THE CONCEPTUAL OF SECOND TRACK DIPLOMACY IN SEA DEFENSE TO INCREASE REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP FOR INDONESIA. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 103(7), 103. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2020-07.13>

- Khoirunnisa, K., & Basri, M. (2020). UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI MASALAH HUMAN TRAFFICKING PADA TAHUN 2006-2018 TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA. *JURNAL POLINTER KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.52447/polinter.v6i1.4140>
- Maksum, A., Tsay, C., & Muhammad, A. (2021). Indonesian Migrant Workers in Taiwan: The State Dilemma and People's Realities. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 24(1), 80. <https://doi.org/10.22146/jsp.51303>
- Putri, F., & Indrawati, I. (2020). DIPLOMASI DUA BUDAYA: STUDI KASUS PERBANDINGAN STRATEGI DIPLOMASI POP CULTURE KOREA SELATAN DAN JEPANG DI INDONESIA. *GLOBAL INSIGHT JOURNAL*, 4(2). <https://doi.org/10.52447/gij.v4i2.3734>
- Susetyo, B., & Ravico. (2020). Strategi Diplomasi Indonesia dalam Pembebasan Papua Tahun 1949-1963. *Ishlah Jurnal Ilmu Ushuluddin Adab Dan Dakwah*, 2(1), 112. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i1.14>
- Linda Sunarti. (2017). Never Ending Brotherhood? Seeking Peace Solutions of Indonesia – Malaysia Confrontation . *International Journal for Historical Studies*, 8(April), 229–242.
- Ghani, R. Hj. A., & Paidi, Z. (2020). The Role of the United States and The “Asian Solution” Approach in the Malaysia-Indonesia Confrontation (1963-1966). *Journal International Studies*, 9. <https://doi.org/10.32890/jis.9.2013.7940>
- Karuppannan, I., & Yacob, S. (2020). Malaysia-Indonesia Konfrontasi: The Struggle for Influence in the Middle East. *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, 93(1), 67. <https://doi.org/10.1353/ras.2020.0016>
- Laksmna, E. A., Singh, B., & Tan, S. S. (2011). DEFENCE DIPLOMACY IN SOUTHEAST ASIA: TRENDS, PROSPECTS AND CHALLENGES.
- Lindsay, J., & Liem, M. H. T. (2011). Heirs to world culture; Being Indonesian 1950-1965. https://doi.org/10.26530/oopen_403204
- Superman, S. (2017). PERISTIWA MANGKOK MERAH DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 1967. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.24127/hj.v5i1.728>
- Tilman, R. O. (1963). Malaysia: the Problems of Federation. *The Western Political Quarterly*, 16(4), 897. <https://doi.org/10.1177/106591296301600409>